



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/10/KEP/DPRD/2022

TENTANG

REKOMENDASI KEPADA BUPATI MAGELANG
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG
TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan Rapat Komisi I sampai dengan Komisi IV membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun Anggaran 2021 pada Tanggal 11 sampai dengan Tanggal 19 April 2022;
- b. bahwa hasil pembahasan tiap komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada Tanggal 20 April 2022 dan dihasilkan Rekomendasi kepada Bupati Magelang sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi kepada Bupati Magelang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar bagi Bupati sebagai bahan dalam:
- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

SARYAN ADIYANTO

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KB. BAG.	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/10/KEP/DPRD/2022
TENTANG
REKOMENDASI KEPADA BUPATI
MAGELANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
MAGELANG TAHUN 2021

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG
TAHUN 2021

1. SEKRETARIAT DAERAH

a. BAGIAN PEMERINTAHAN

Bagian Pemerintahan mempunyai beberapa tugas diantaranya: mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerah, fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal pemerintah daerah dan tugas lain di bidang otonomi daerah. Maka dalam urusan pemerintahan keberadaan Bagian Pemerintahan sangatlah urgen, sehingga untuk melaksanakan fungsi dan perannya tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan semua pihak.

b. BAGIAN HUKUM

Terkait dengan masih banyaknya regulasi Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai turunan petunjuk pelaksanaannya, Bagian Hukum dituntut untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya, khususnya dalam melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati, serta produk hukum lainnya. Selain itu Bagian Hukum untuk terus untuk melakukan reviu terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan zaman maupun tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Total realisasi capaian keuangan Bagian Kesra di tahun 2021 sebesar 98.01%. DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- 1) Adanya ketimpangan anggaran hibah untuk pesantren yang mendapatkan alokasi hibah, untuk itu DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan terkait anggaran hibah untuk pesantren harus berdasarkan skala prioritas dan dalam kegiatan proses verifikasi validasi harus diperbaiki.
- 2) Terkait insentif untuk guru ngaji dalam penentuan kriteria pendataan guru ngaji dilakukan oleh Kemenag, namun masih ada keluhan dan aduan tentang masih adanya penerima insentif guru ngaji yang tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan. Untuk itu DPRD Kabupaten Magelang mendorong Bagian Kesra dimana Pemerintah Daerah harus punya kontrol dalam penentuan kriteria pendataan guru ngaji dilakukan oleh Kemenag dengan melibatkan pemerintah desa dalam pendataan guru ngaji.

d. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

- 1) Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu tugas-tugas kepala daerah dalam mengambil kebijakan terkait permasalahan di bidang perekonomian. Sedangkan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki Bagian Perekonomian dan SDA masih jauh dari kondisi yang ideal, dari 15 formasi yang dibutuhkan namun baru terisi 6 formasi. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar Bagian Perekonomian dapat mengusulkan penambahan formasi PNS untuk mencukupi kebutuhan organisasi sehingga pencapaian target-target kinerja bisa tercapai.
- 2) Adanya gejolak harga kebutuhan pokok yang terjadi pada akhir tahun 2021 sehingga menyebabkan keresahan para pelaku usaha UKM maupun masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Komisi II mendorong agar Bagian Perekonomian dan SDA sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diharapkan mampu untuk mengolah dan menyajikan data serta mengkoordinasikan dengan instansi vertikal lainnya baik TPID Provinsi maupun pusat sehingga dalam waktu tidak terlalu lama dapat dirumuskan solusi kebijakan jangka pendek.

- 3) Bagian Perekonomian dan SDA agar mendorong bank milik pemerintah daerah untuk melakukan relaksasi pinjaman terhadap para pelaku UKM yang terdampak atas kenaikan beberapa komoditas sehingga diharapkan para pelaku usaha tersebut tetap mampu menjalankan produksinya.
- 4) DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar pemanfaatan Anggaran DBHCHT dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, Bagian Perekonomian dan SDA selaku koordinator atas penggunaan anggaran tersebut harus mampu memverifikasi sejauh mana anggaran tersebut dilaksanakan serta mengevaluasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
- 5) Bagian Perekonomian dan SDA selaku koordinator dari Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat mendorong kepada PDAU untuk menginventarisasi dan melakukan pencatatan terhadap asset-asset yang seharusnya menjadi milik PDAU, sehingga diharapkan dengan adanya kejelasan kepemilikan aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh PDAU untuk mengembangkan serta membuka usaha bisnis yang baru.
- 6) Alasan keterbatasan SDM menjadi kendala utama dalam pengembangan BKK pada saat ini, oleh karena itu DPRD Kabupaten Magelang mendorong kepada Bagian Perekonomian dan SDA untuk terus menerus melakukan pembinaan terhadap BKK yang ada saat ini serta mencari solusi agar BKK mampu bersaing dengan kompetitor yang lain.
- 7) Atas pemanfaatan dan pengolahan sumber mata air di wilayah Kabupaten Magelang yang saat ini sebagian dikelola dan dimanfaatkan oleh PDAM kabupaten/kota sekitar, DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar ada terobosan kebijakan yang dapat menjadikan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Magelang atas pemanfaatan sumber mata air tersebut.

e. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jumlah anggaran belanja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 231.920.735 dengan realisasi sebesar Rp. 229.004.709 atau sebesar 98.74%, DPRD Kabupaten Magelang memberikan catatan agar Bagian Administrasi Pembangunan melakukan pengawasan yang intensif agar dalam menyampaikan data pada saat Rakor POK data yang disampaikan sesuai dengan kondisi real di lapangan.

f. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jumlah anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2021 Sebesar Rp. 663.745.600 dengan realisasi sebesar Rp. 602.242.700 atau sebesar 90.73%, DPRD Kabupaten Magelang memberikan catatan agar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan proses kegiatan pengadaan dengan angka yang besar agar bisa diinformasikan pada triwulan pertama APBD sehingga proses lelang dapat berjalan dan tidak menumpuk di akhir tahun.

g. BAGIAN UMUM

Tidak ada rekomendasi

h. BAGIAN ORGANISASI

Tidak ada rekomendasi

i. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan didukung SDM yang mumpuni, baik ASN maupun tenaga Suporting Staf diharapkan bisa terus lebih baik. Bagian yang mengkoordinir Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan tersebut kedepan agar bisa lebih profesional, sehingga tugas fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan benar-benar maksimal utamanya dalam melayani pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati.

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tidak ada rekomendasi.

3. INSPEKTORAT

- a. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian maka peran dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah menjadi sangat strategis. Inspektorat diharapkan bisa menjadi *Quality Assurance*, melalui dari melaksanakan: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

- b. Dalam melakukan tugas dan fungsinya Inpektorat juga harus selalu melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan maupun dengan Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga harapannya ke depan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan.

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 4 program, 13 kegiatan, yang terinci dalam 66 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran 2021 sebesar Rp. 740.100.325.466,- Adapun Realisasi Anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 702.767.702.328,- (94,99 %),

Berdasarkan capaian anggaran dan capaian terhadap indikator pelaksanaan program dan kegiatan, DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- a. Dampak pandemi Covid-19 bagi siswa adalah sekolah daring, sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta melakukan perencanaan kebijakan sekolah agar standar mutu pendidikan tetap memenuhi syarat kebutuhan abad 21.
- b. Target RPJMD untuk sekolah SD dan SMP Negeri pada tahun 2023-2024 terakreditasi A di semua SD dan SMP Negeri di Kabupaten Magelang, namun pada kenyataannya saat ini masih adanya ruang kelas, mebeler, perpustakaan, perangkat IT dan sarana MCK di SD dan SMP yang dalam kondisi rusak. Untuk itu, DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan untuk diprogramkan mendapat bantuan DAK Tahun 2023 mendasari skala prioritas.
- c. Terdapat kerusakan ruang kelas, mebeler, perpustakaan dan perangkat IT di SD, MI, SMP dan MTS Suasta. Untuk itu, DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan untuk segera dianggarkan rehab berat ruang kelas, pembangunan, rehab perpustakaan, mebeler dan perangkat IT melalui bantuan hibah tahun 2023.
- d. Berkurangnya siswa/siswi di SD Negeri dan SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Magelang perlu dilakukan kajian lapangan dan dicarikan solusi, baik dalam bentuk pemenuhan fasilitas penunjang pendidikan maupun regulasi aturan, agar jumlah siswa SD Negeri dan SMP Negeri tidak semakin berkurang.

- e. Untuk Peningkatan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan terkait anggaran untuk operasional PKBM untuk ditingkatkan karena siswa didik yang belajar di PKBM berasal dari masyarakat kurang mampu.
- f. Minimnya sarana dan prasarana untuk kegiatan berkesenian di sekolah baik di tingkat SD Negeri maupun SMP Negeri. DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan segera untuk dianggarkan untuk pemenuhan sarpras alat-alat kesenian baik untuk SD Negeri maupun SMP Negeri yang mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan kesenian.
- g. Terkait tenaga kependidikan yang telah mengikuti tes PPPK dan dinyatakan lulus, sampai dengan saat ini Keputusan Pengangkatan belum diterima yang mengakibatkan para tenaga kependidikan tersebut dari bulan Januari – Maret terkait gaji belum ada kejelasan untuk DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan untuk segera mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

5. DINAS KESEHATAN

Urusan kesehatan di Kabupaten Magelang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Muntilan dan RSD Merah Putih. Dinas Kesehatan pada tahun 2021 memiliki 5 program, 17 kegiatan dan 57 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 390.116.208.098,00 dan tercapai realisasi sebesar Rp. 295.640.552.463,00 atau 75,78%. Anggaran tersebut meliputi anggaran di Dinas Kesehatan, RSD Merah Putih, dan 29 Puskesmas. DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- a) Capaian keuangan untuk kegiatan di puskesmas yang bersumber dana dari DAK (BOK Puskesmas) sebesar 54,26%. Hal ini terjadi karena banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM, dimana dilakukan pembatasan kegiatan pertemuan seperti skrining kesehatan dan pengurangan jumlah peserta pertemuan. Untuk itu segera dicarikan solusi terkait permasalahan tersebut.
- b) Adanya Masyarakat miskin banyak yang belum mempunyai sarana MCK di setiap rumah, untuk itu DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan perlu bantuan hibah tahun 2023 untuk membangun MCK bagi warga masyarakat miskin.
- c) Gedung laboratorium kesehatan Kabupaten Magelang telah selesai dibangun, namun peralatan kesehatan dan kedokteran masih jauh dari kebutuhan, untuk itu agar segera dianggarkan pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran serta regulasi terkait besaran retribusinya untuk

mendukung operasionalisasi laboratorium kesehatan tersebut sehingga PAD dari pemanfaatan Gedung Laboratorium bisa diperoleh.

- d) Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Merah Putih sudah selesai ditahun 2021 namun belum dapat melayani pasien karena sarana pendukungnya belum disiapkan, untuk itu DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan segera diprogramkan ditahun 2023 pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran agar bangunan tersebut segera digunakan untuk pelayanan
- e) Capaian keuangan untuk kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terserap hanya 58,55 %, Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat miskin atau kurang mampu di Kabupaten Magelang yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu Segera dicarikan solusi terkait permasalahan tersebut.
- f) Jumlah angka stunting yang cenderung makin banyak. Butuh sinergitas antar instansi untuk mengatasi masalah stunting, tidak cukup sosialisasi dan bantuan sementara tapi harus ada upaya pemberdayaan yang berkelanjutan
- g) Permasalahan validasi data stunting agar lebih akurat sehingga solusi yang diambil efektif dan tepat sasaran. Penentuan anak stunting tidak hanya atas dasar Aplikasi EPPGBM, tetapi harus ada kajian yang detail dan langsung bersentuhan dengan anak yang berpotensi stunting

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alokasi anggaran DPUPR pada tahun 2021 terbagi atas pendapatan sebesar Rp 1.097.500.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.364.243.860,00 belanja operasi sebesar Rp 128.965.887.158,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 122.160.721.052,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp 86.485.570.265,00 dengan realisasi sebesar Rp 81.235.686.272,00 Anggaran tersebut dijabarkan dalam 7 program dan 41 kegiatan. Atas realisasi pelaksanaan program kegiatan DPUPR , adapun beberapa hal menjadi catatan dari DPRD Kabupaten Magelang yaitu:

- a) Dalam pembangunan infrastruktur, DPUPR harus memperhatikan kualitas hasil pekerjaan, serta jangka usia atas manfaat hasil pekerjaan. DPRD Kabupaten Magelang menekankan adanya penataan sistem perencanaan yang lebih baik dan terperinci, meningkatkan pengawasan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau penyedia barang/jasa, sehingga hasil yang dicapai dapat mencapai harapan dan bermanfaat bagi masyarakat.

- b) Terkait infrastruktur jalan, DPUPR diharapkan dapat melakukan monitoring atau pengawasan secara berkala terhadap kondisi jalan – jalan yang ada di Kabupaten Magelang. Sehingga dari hasil monitoring atau pengawasan tersebut, DPUPR dapat menyajikan data yang komprehensif, yang mana dapat mengukur tingkat penambahan kerusakan, progress atau keberhasilan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.

7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Anggaran Belanja DPRKP pada Tahun Anggaran 2021 pada 6 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan sebesar Rp 4.712.989.211,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 4.443.906.664,00 atau 94,29%. Tolak ukur keberhasilan capaian kinerja urusan perumahan meliputi rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni. Atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 pada DPRKP, DPRD Kabupaten Magelang memberikan catatan sebagai berikut:

Terkait dengan pelaksanaan Program RTLH, DPRD Kabupaten Magelang mengharapkan DPRKP memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang telah terverifikasi sebelumnya tentang keharusan adanya proposal bagi penerima RTLH. Sehingga penerima RTLH yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh DPRKP dapat menerima haknya. DPRD Kabupaten Magelang juga berharap agar DPRKP memiliki data primer terkait RTLH yang telah tervalidasi selain data dari DTKS.

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Masih adanya berbagai permasalahan dan kendala dalam melaksanakan tugas fungsinya, kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran dituntut agar kedepan lebih baik lagi, utamanya dalam penegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP harus terus memaksimalkan kinerjanya, diantaranya dengan membekali diri melalui peningkatan kapasitas SDM yang ada, meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, serta menjalin koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan instansi lain dan pihak-pihak terkait.

9. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Sosial, PPKB dan PPPA melaksanakan fungsi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana. Terkait realisasi anggaran di Dinas Sosial, PPKB dan PPPA di tahun 2021 sebesar 93,72%. DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- a) Semakin banyaknya petugas PLKB di setiap kecamatan yang pensiun. Saat ini hanya ada 46 petugas PLKB, sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, untuk itu DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan Dinas Sosial, PPKB dan PPPA untuk segera diprogramkan petugas PLKB non PNS dengan status Suporting Staff di semua kecamatan.
- b) Masih adanya ratusan kader kesehatan dan kader KB yang belum mempunyai kartu JKN KIS, untuk itu DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan Dinas Sosial, PPKB dan PPPA untuk segera diprogramkan agar mereka mendapatkan kartu JKN KIS yang dibiayai dari APBN/APBD.
- c) Untuk mencegah maraknya pernikahan usia dini yang berimbas pada meningkatnya angka stunting, untuk itu DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan Dinas Sosial, PPKB dan PPPA melakukan Penambahan anggaran untuk menghidupkan dan mengaktifkan kembali Posyandu Remaja (POSMA) dengan berbagai program kegiatan yang sesuai dengan usia.
- d) Gedung kantor Dinas Sosial, PPKB dan PPPA sudah tidak layak khususnya tempat untuk pelayanan kepada masyarakat untuk itu segera dicarikan solusi terkait permasalahan tersebut.

10. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Berkaitan dengan ketenagakerjaan, Untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, terkait realisasi kinerja anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN 90, 74%. Realisasi kinerja anggaran untuk belanja operasi & modal 85,73%. Total realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di tahun 2021 sebesar 89,06%. DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut :

- a) Jumlah pengangguran semakin meningkat serta jumlah korban PHK akibat pandemi semakin banyak, untuk itu DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan Disperinnaker memprogramkan kegiatan pendidikan kewirausahaan dan ketrampilan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri
- b) Disprinaker diharapkan untuk menghasilkan kebijakan bersifat lintas sektoral dan terintegrasi antara seluruh OPD untuk mengupayakan

penciptaan lapangan kerja baru yang produktif padat karya dan banyak menyerap para pencari kerja baru. Terkait program JOBFAIR untuk dilakukan evaluasi keterserapan tenaga kerja dalam setiap pelaksanaannya

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran pendapatan Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 860.592.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 877.293.375,00 atau 101,94% dan anggaran belanja sebesar Rp 25.716.165.401,00 terserap sebesar Rp 23.104.175.03,00 atau 89,84%. Atas realisasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, adapun catatan dari DPRD Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a) Penanganan sampah di TPA yang dimiliki Pemerintah Daerah saat ini masih menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan sampah itu sendiri maupun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Mengingat penanganan sampah secara swadaya mandiri sangat diperlukan, untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah, DPRD Kabupaten Magelang menekankan kepada DLH untuk lebih intens memberikan edukasi, advokasi, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga. DLH diharapkan meningkatkan pembinaan untuk dapat mengubah paradigma di masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga keberadaan program kelompok bank sampah dapat mendorong pengelolaan sampah secara swadaya mandiri.
- b) DLH diharapkan dapat menggerakkan pembangunan TPS 3R di setiap Kecamatan serta memberikan pembinaan tentang penerapan reduce (pengurangan), reuse (guna ulang), dan recycle (mengelolah menjadi produk lain). Memfasilitasi sarana prasarana dan melakukan pendampingan bagi 3R dan Bank Sampah, serta mendorong terbentuknya forum TPS 3R yang efektif.
- c) Mendorong DLH untuk segera mewujudkan TPA regional yang memenuhi kaidah teknis, sosial ekonomi dan lingkungan serta lokasi agar permasalahan sampah di Kabupaten Magelang segera tertangani. TPA regional diharapkan dapat mencakup kecamatan - kecamatan di Kabupaten Magelang.
- d) Diperlukan inovasi pengembangan program konservasi lahan dan sumber daya air secara menyeluruh dan inovatif dalam merancang pemanfaatannya berbasis kelompok pemukiman masyarakat dengan mengadopsi kearifan lokal sebagai sumber kemandirian masyarakat dalam mengelola sumberdaya air secara berkelanjutan.

- e) Terkait pelaksanaan program konservasi mata air dan resapan air, DPRD Kabupaten Magelang menekankan agar program kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk meningkatkan pendapatan daerah, hal ini juga diperlukan adanya pendekatan budaya dalam rangka pelestarian lingkungan, khususnya terkait penyelamatan sumber mata air. Pendekatan budaya dirasa akan lebih efektif dibanding sekedar memberikan himbauan/larangan. salah satu contoh bentuk kegiatan penyelamatan mata air dengan pendekatan budaya seperti "SLAMETAN MATA AIR". yang dilaksanakan oleh penduduk lokal.
- f) Perlu ada tema ekonomi dalam setiap kegiatan penyelamatan lingkungan, baik untuk konservasi lahan dan sumber daya air, yaitu kegiatan "EKOLOGI BEREKONOMI". Karena selama ini kegiatan penyelamatan lingkungan masih dianggap sebagai kegiatan sosial yang tidak bisa memberikan dampak ekonomi, padahal kalau dilihat lebih dalam ada potensi ekonomi yang bisa digali di dalamnya. Contoh penanaman alpukat, penanaman pohon aren, dan sebagainya. Korelasi antara penanaman pohon aren dan besarnya potensi ekonomi gula aren harus kita gaungkan secara serentak.

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ada sebagian masyarakat yang belum tahu mengenai proses pelayanan administrasi kependudukan, termasuk dalam pembuatan e-KTP melalui *WA on line* menuntut Disdukcapil untuk terus melakukan sosialisasi di masyarakat. Pembinaan dan sosialisasi masih sangat perlu guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data administrasi kependudukan.

13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Dengan semakin besarnya anggaran yang didistribusikan ke desa menuntut adanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Hal itulah yang menuntut agar pendampingan desa harus lebih ditingkatkan. Agar Pendamping Desa bisa melaksanakan perannya dengan lebih baik, maka Dispermades perlu terus melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap para pendamping desa, mengingat saat ini peran dan fungsi pendamping desa masih dirasa belum optimal.
- b. Penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa yang selalu bermasalah di awal tahun diharapkan tidak terjadi lagi. Gaji bagi perangkat desa yang di awal tahun selalu mengalami keterlambatan karena alasan regulasi dan permasalahan teknis kedepan agar bisa dicarikan solusi.

- c. Adanya Pembangunan Desa Berbasis Kawasan diharapkan dapat mempercepat pembangunan wilayah perdesaan di Kabupaten Magelang. Seiring dengan Undang-Undang Desa yang menggariskan bahwa pembangunan desa dengan pendekatan kawasan diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik, serta memperkuat kerjasama antar desa guna memajukan desa-desa dan menyejahterakan masyarakat. Dispermades selaku Perangkat Daerah yang membidangi kedepan diharapkan bisa mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berbasis kawasan tersebut.
- d. Dengan belum optimalnya pemanfaatan berbagai Aplikasi di Desa menuntut Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pemanfaatan berbagai aplikasi yang telah ada. Dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait Dispermades diharapkan mampu mendorong pemanfaatan aplikasi yang ada di desa secara optimal, sehingga kedepan aplikasi desa dapat mengakomodir Sistem Keuangan Desa secara *on line* dan terintegrasi dengan Pemerintah Daerah.

14. DINAS PERHUBUNGAN

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan mendapat alokasi sebesar Rp. 29.792.338.020,00 terealisasi sebesar Rp. 28.933.946.105,00 atau sebesar 97,12 % dengan realisasi fisik 99,40%. Atas realisasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan adapun catatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

- a) DPRD Kabupaten Magelang menekankan agar dalam proses pembentukan Peraturan Bupati yang sedang berjalan, terkait penerangan jalan umum, untuk dapat lebih mempertegas pembagian kewenangan desa dan kewenangan daerah. Sehingga anggaran penerangan jalan umum yang disediakan akan sesuai alokasinya.
- b) DPRD Kabupaten Magelang mendorong Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan retribusi Kajian potensi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang lebih komprehensif dan menyeluruh (*sensus*) agar mendapatkan hasil dan proyeksi yang lebih baik serta melaksanakan dialog kebijakan multi pihak bagi peningkatan PAD Kabupaten Magelang dan Industri pariwisata serta pendukungnya.
- c) Dinas Perhubungan agar meningkatkan pengawasan terkait kelayakan kendaraan serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan KIR untuk mengoptimalkan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada Tahun 2021 Diskominfo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.119.610.425,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.026.889.249,00 atau 92,26 % dan Pendapatan sebesar Rp 1.102.700.000,00. DPRD Kabupaten Magelang memberikan catatan:

- a) Untuk meningkatkan pendapatan retribusi tower/menara telekomunikasi, DPRD Kabupaten Magelang menekankan agar DISKOMINFO dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait data penambahan tower/menara telekomunikasi yang akan menjadi dasar dalam memproyeksikan besar pendapatan.
- b) Kemajuan teknologi harus bisa memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pembangunan kabupaten magelang. Baik berupa peningkatan pelayanan pemerintah kabupaten kepada masyarakatnya, maupun peningkatan ekonomi bagi masyarakat secara langsung.

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- a. DPRD Kabupaten Magelang mengapresiasi atas sistem pelayanan berbasis Online single Submission (OSS) yang selama ini telah dilakukan oleh DPMPTSP, sehingga masyarakat lebih mudah dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan, DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar para pelaku UKM dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengurus izin usahanya.
- b. Maraknya pemberitaan adanya investasi ilegal pada akhir-akhir ini, DPRD Kabupaten Magelang mendorong kepada DPTMPTSP agar lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman investasi yang benar dan aman sehingga terhindar dari penipuan ataupun investasi ilegal.

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DPRD Kabupaten Magelang memberikan apresiasi yang tinggi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas diperolehnya beberapa penghargaan antara lain : Sebagai Perpustakaan Kabupaten/Kota terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2021 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan BAPPENAS RI. Penghargaan Kearsipan dengan predikat “Memuaskan” dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan Lembaga Kearsipan Daerah terbaik se-Jawa Tengah. Semoga hal ini membuat para peminat baca semakin meningkat dengan didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan gedung perpustakaan yang nyaman.

Salah satu dampak pandemi Covid-19 bagi siswa adalah sekolah daring yang mengakibatkan turunnya minat baca. Untuk itu, diharapkan Dispuspa dapat bekerjasama dengan Disdikbud melaksanakan program peningkatan minat baca dan mengembangkan perpustakaan sekolah serta layanan perpustakaan keliling yang menjangkau pelosok desa-desa.

18. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan kesehatan hewan ternak, DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar Dinas Perikanan dapat menampilkan data dokter hewan yang bertugas ataupun melakukan praktek di wilayah Kabupaten Magelang dengan disertai alamat serta nomor kontak yang bisa dihubungi, sehingga diharapkan kepada para pemilik hewan ternak lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan ke dokter hewan terdekat diwilayahnya.

Dinas perternakan dan perikanan agar memastikan bahwa kegiatan sosialisasi program-program dari pemerintah daerah yang selama ini rutin dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut, sehingga *outcome* dapat dirasakan oleh masyarakat.

19. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

- a. Dalam upaya meningkatkan daya dukung potensi pariwisata, DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar Dinas Pariwisata melakukan *Feasibility Study* (FS) dengan tujuan untuk pengembangan desa wisata berbasis kewilayahan sehingga masing-masing potensi unggulan desa dapat dioptimalkan.
- b. Dinas pariwisata agar melakukan pelatihan manajemen perencanaan terhadap para pelaku pariwisata sehingga apa yang menjadi kebutuhan pariwisata bisa ditangkap oleh para pelaku pariwisata.

20. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- a. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar Dinas Pertanian secara aktif mengawal program pertanian modern dan ramah lingkungan atau yang sering disebut dengan istilah "Upline", upaya-upaya pembinaan baik melalui transformasi teknologi maupun dukungan anggaran perlu untuk terus ditingkatkan.
- b. DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun peraturan Bupati yang merupakan amanat sekaligus petunjuk

pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

- c. Adanya kejadian bencana alam pada tahun 2021 telah berdampak pada kerusakan lahan pertanian bahkan sebagian diantaranya berakibat gagal panen. Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar Dinas Pertanian dan Pangan dapat memberikan bantuan kepada para petani yang terdampak bencana alam dan untuk kedepannya. DPRD Kabupaten Magelang mengusulkan adanya asuransi bagi para petani.
- d. Untuk menekan mahalnya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh para petani penggarap sawah, DPRD Kabupaten Magelang mengusulkan agar ada penambahan atau perluasan kuota kartu tani yang akan dimanfaatkan untuk memperoleh subsidi bantuan pupuk.
- e. Salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, DPRD Kabupaten Magelang meminta kepada Dinas Pertanian dan pangan agar lebih mempermudah prosedur untuk memperoleh surat izin penggunaan solar, sehingga masyarakat di pelosok tidak harus datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian.

21. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- a. Fluktuasi harga kebutuhan pokok seperti kedelai dan minyak goreng telah berimbas terhadap para pelaku usaha kecil seperti produsen tahu, tempe dan para pedagang gorengan. Meskipun komoditi kedelai hampir 90% merupakan komoditas impor, namun tentunya harus ada upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah agar para pelaku usaha kecil tersebut tetap dapat berproduksi. Dalam hal ini DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar Dinas Perdagangan lebih responsive terhadap keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat dengan terjun langsung melakukan pengawasan dan pendataan serta mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
- b. Dinas Perdagangan diharapkan mampu menyajikan data fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat secara berkala. Sehingga manakala terjadi harga komoditas diluar batas kewajaran dapat segera tertangani dengan cepat, baik melalui kegiatan operasi pasar ataupun kebijakan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu yaitu dengan melibatkan PNS untuk membeli produk lokal petani manakala terjadi penurunan harga di bawah BEP.

22. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

- a. Mundurnya penerimaan SK CPNS yang disebabkan karena mundurnya pemberkasan dari panitia seleksi pusat menyebabkan capaian Gaji dan Tunjangan CASN pada BKPPD hanya terserap 33,24 %. Hal tersebut bisa dijadikan catatan sehingga kedepan dapat diantisipasi.
- b. Pengangkatan PPPK guru yang berasal dari sekolah swasta yang harus berpindah ke sekolah negeri merupakan permasalahan baru. Beberapa sekolah swasta menjadi kekurangan guru, para guru yang telah bertahun-tahun mengabdikan dan dibina di sekolah swasta tiba-tiba harus meninggalkan sekolah asalnya. Eksodus guru ke sekolah negeri tersebut ternyata juga mendatangkan masalah, sebagian sekolah negeri mengalami kelebihan guru yang jelas akan berdampak pada pembagian jam mengajar bagi guru. Maka untuk mencari solusi permasalahan tersebut, BKPPD untuk segera melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- c. Pentingnya pembinaan dan penataan pegawai secara komprehensif dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Kabupaten Magelang, maka BKPPD diharapkan dapat terus meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal. Masih adanya permasalahan kedisiplinan pegawai selama ini hendaknya dapat dijadikan sebagai dasar pola pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah secara konsisten dan periodik. Selain itu dengan masih adanya kekosongan jabatan tinggi pratama di beberapa OPD, DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar BKPPD segera mengajukan usulan ke Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, tentunya dengan tetap memandang persyaratan normatif, kelayakan serta kompetensinya.

23. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

- a. Pendapatan Asli Daerah yang mengalami trend positif di tahun 2021 layak mendapatkan apresiasi, Pendapatan Asli Daerah pada BPPKAD yang ditargetkan Rp 154.099.624.001,00 tercapai Rp. 165.470.691.554,00 (107,38 %). Capaian tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang bersumber dari pajak Galian Golongan C hanya tercapai Rp. 3.272.820.406,00 (65,46%) dari target anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,00 menjadikan keprihatinan semua pihak. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Magelang mendorong agar BPPKAD dapat

melakukan langkah-langkah konkrit guna mencari solusi terbaik, sehingga penerimaan pajak daerah tersebut bisa ditingkatkan kembali.

- b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sepenuhnya tergantung pada kemampuan daerah dalam melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi pendapatan serta inovasi. Untuk dapat melakukan inovasi pendapatan tersebut mutlak dibutuhkan kajian-kajian tentang potensi pendapatan daerah. Maka guna melakukan inovasi tersebut, DPRD Kabupaten Magelang mendorong kepada BPPKAD untuk segera melakukan Kajian Potensi Pendapatan Daerah secara komprehensif.
- c. Terkait dengan pengelolaan aset daerah, BPPKAD diharapkan terus melakukan pengamanan dan pemanfaatan aset yang ada dengan lebih baik. Permasalahan tanah Pemerintah Daerah yang berada di beberapa tempat antara lain di Desa Banyuurip, di Desa Blondo dan di wilayah lainnya hendaknya dapat segera diselesaikan. Kehati-hatian dalam melakukan proses penyertifikatan tanah juga harus menjadi prioritas, hal tersebut penting guna meminimalisir terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Anggaran Belanja Bappeda dan Litbangda Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.571.723.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.301.107.389,00 atau sebesar 96,43% dan capaian fisik kegiatan rata-rata sebesar 100%. DPRD Kabupaten Magelang memberikan catatan:

- a) Adanya beberapa capaian kegiatan yang kurang maksimal dalam penyerapannya, DPRD Kabupaten Magelang menekankan kepada Bappeda dan Litbangda agar lebih mencermati kembali dalam penyusunan dan perencanaan anggaran.
- b) DPRD Kabupaten Magelang mendorong adanya perencanaan kerjasama daerah terkait hasil sumber daya alam daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk menambah potensi pendapatan daerah.

25. KECAMATAN

Tidak ada rekomendasi.

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BPBD melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Total realisasi capaian keuangan BPBD di Tahun 2021 sebesar 92,41 % sedangkan capaian fisik 107,84%. DPRD Kabupaten Magelang memberikan rekomendasi sekaligus catatan sebagai berikut:

- a. Jumlah relawan kebencanaan ada sekitar 4600 dan ada ratusan belum mempunyai kartu JKN KIS. Dalam melaksanakan tugasnya Potensi kecelakaan dan resiko dari para relawan maupun Tim penagulangan bencana cukup tinggi. Untuk itu, DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan BPBD untuk segera diprogramkan agar mereka mendapatkan kartu JKN KIS yang dibiayai dari APBN/APBD.
- b. Pontensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Magelang cukup tinggi sedangkan alat-alat yang di butuhkan untuk penanganan kebencanaan masih terbatas. Untuk itu DPRD Kabupaten Magelang merekomendasikan kepada BPBD agar segera diprogramkan pengadaan dan dianggarkan bantuan alat perlengkapan untuk penanganan bencana bagi organisasi-organisasi relawan yang ada di kabupaten Magelang.

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Peran fungsi Badan Kesbangpol dalam rangka pembinaan masyarakat harus terus ditingkatkan. Sebagai penyelenggaraan urusan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri dan kehidupan berdemokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Badan Kesbangpol mempunyai peran yang sangat organ dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO